

POLITIK ETIS DAN MUNCULNYA GOLONGAN ELIT MODERN INDONESIA

Elisa Sunarti Manurung¹, Muhammad Ardiansyah Rasuna², Putri Lorenza Simanjuntak³
Universitas Negeri Medan

<i>Article Info</i>	<i>ABSTRAK</i>
<p>Article history: Published Mei 31, 2024</p> <hr/> <p>Kata Kunci: Politik Etis, Elit Pribumi, Penjajahan.</p>	<p>Politik etis menuntut Indonesia kearah kemajuan, namun masih tetap berada di bawah naungan penjajah belanda. Pada awalnya politik etis dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan belanda membantu Indonesia dalam masa kesulitan sebagai bentuk balas budi belanda terhadap Negara jajahannya. Meskipun pada kenyataannya kebijakan politik etis tidak serta merta mensejahterakan rakyat karena belanda melakukannya dengan tidak tulus, melainkan dengan keterpaksaan karena dihadapkan dengan kritik keras dari para pemuda. Kebijakan politik etis pemerintah belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi pribumi adalah langkah awal bagi kaum muda Indonesia. Meskipun awalnya sekolah hanya untuk elit pribumi, namun kemudian para anak bangsawan tersebut muncul sebagai kaum intelek yang memikirkan nasib bangsanya yang tertindas. Melihat penjajah belanda yang semakin menindas pribumi, kemudian para elit pribumi itu mengajak rakyat pribumi untuk melawan penjajah belanda, gagasan perlawanan tersebut dimulai dengan dibentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti budi utomo, sarekat islam, dan indische partij.</p>

1. PENDAHULUAN

Politik Etis atau merupakan politik balas budi adalah bentuk tanggung jawab moral yang dilakukan oleh pemerintah hindia kolonian belanda kepada masyarakat pribumi. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa akibat dari tanam paksa kolonial belanda.

Politik etis atau politik balas budi adalah konsep yang menyatakan bahwa pemerintah Kolonial Belanda memiliki kewajiban moral untuk memastikan kesejahteraan rakyat Nusantara. Pada saat berganti dari abad ke-19. Pada abad ke-20, politik etis ini muncul seiring dengan perubahan paradigma politik kolonial Belanda saat itu, yang juga dikenal sebagai politik Kolonial Moral. (Museum Kepresidenan, 2019)

Istilah Politik Etis sering disebut juga sebagai politik paternaslisasi atau perlindungan karena dalam pemerintahan, rakyat Indonesia hanya dianggap sebagai objek dari pada partisipan. Namun dengan adanya Politik Etis tersebut tentu saja berhasil membuat permutubuhan baru terhadap rakyat Nusantara, salah satunya adalah munculnya berbagai macam kalangan yang terdidik, adanya saluran irigasi untuk pertanian dan perkebunan, juga terjadinya perpindahan penduduk dalam transmigrasi. (Sartono Kartodirjo, 1993)

Munculnya politik etis disebabkan oleh rasa bersalah terhadap politik kolonial di masa lalu, juga karena kesadaran akan keadilan dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Namun dengan munculnya gerakan nasional, masyarakat dapat memberikan arah pada politik kolonial, terutama dalam hal kesadaran akan nilai dan kekuatan mereka sendiri. Dengan munculnya situasi tersebut, pemerintah kolonial juga mulai merenungkan kembali cara mereka mengatasi masalah gerakan nasional. terhadap gerakan politik yang dilakukan oleh masyarakat pribumi.

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda masih menerapkan sistem sentralisasi, tetapi kemudian sistem birokrasinya yang kaku menyebabkan terjadinya perubahan menuju sistem desentralisasi dalam pemerintahan. Dengan adopsi desentralisasi ini, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Volksraad (Dewan Rakyat) yang anggotanya berasal dari kalangan elit politik, sehingga memperkenalkan konsep-konsep politik Barat ke dalam ranah politik. Namun, pembentukan dewan rakyat ini menyebabkan perpecahan dan perbedaan pendapat di antara berbagai kelompok masyarakat, yang akhirnya menimbulkan diskriminasi.

Pelaksanaan politik etis ini awalnya sukses diprakarsai oleh masyarakat pribumi yang penuh semangat, namun pada awal tahun kedua semakin meredup dan keefektifan sistem politik etis ini mulai dipertanyakan. Setelah timbulnya kemajuan sosial-politik sejak Kebangkitan Nasional dan Perang Dunia yang membuat situasi politik melemah, termasuk politik etis. Pada tahun 1916, politik etis telah gagal dan kemajuan yang telah terjadi tidak disebabkan oleh kebijakan politik etis.

Alasan utama Belanda menerapkan politik etis ini adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Namun pada akhirnya politik tersebut telah berhasil menciptakan kalangan terpelajar, menyebabkan berbagai organisasi gerakan dari individu yang terdidik yang pada akhirnya menjadi pendorong dalam menentang penjajahan dan imperialisme. Setelah Pergerakan Nasional muncul, kesadaran dan aktivitas masyarakat pribumi dalam mencapai tujuan tertentu kembali mencapai puncaknya. Namun, ini berarti bahwa tujuan dari politik etis telah diadopsi oleh kaum pribumi sendiri, sehingga peran paternalisme dalam politik telah berkurang. Etika ini sudah tidak diikuti lagi oleh kaum Hindia Belanda. Munculnya golongan elit modern di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial negara tersebut. (Poesponegoro & Notosusanto, 1993)

2. METODOLOGI

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data mulai dari sumber-sumber yang mendukung dan data-data yang terkumpul dari bahan bacaan, referensi dan buku atau pun jurnal yang di baca untuk memperkuat suatu data untuk terbentuknya data yang dapat di percaya. Penelitian kualitatif digunakan apabila permasalahannya belum jelas, untuk mengetahui makna tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk menjamin kebenaran data dan untuk meneliti sejarah perkembangan. Dimana Sejumlah alasan pun dikemukakan, yang intinya penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode yang menyelidiki fenomena sosial dan permasalahan manusia. Penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang-orang di lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, mencoba memahami bahasa dan interpretasinya terhadap dunia di sekitar makhluk hidup, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berkaitan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, mengeksplorasi

pandangan dan pengalaman untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan untuk memperoleh data yang akurat.

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan di lokasi di mana peserta mengalami masalah atau masalah yang diteliti. Informasi yang dekat ini dikumpulkan dengan benar-benar berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka berperilaku dan bertindak dalam konteks mereka adalah karakteristik utama dari penelitian kualitatif. (Creswell, 2018:298)

Dimana pada metode penelitian ini kami mengumpulkan data dari bahan bacaan serta referensi yang kami gunakan untuk menyempurnakan data-data yang dapat menunjang perolehan data yang akurat, untuk dapat di baca dan menjadi bahan referensi banyak khalayak umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan dalam peta politik pemerintahan Belanda di Indonesia, dari politik kolonial liberal yang telah dijalankan sejak tahun 1870 dengan suatu tatanan politik baru yang lebih menekankan pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Garis politik baru tersebut dikenal sebagai “Politik Etis”, yang diperkenalkan pertama kali secara resmi dalam pidato tahunan Kerajaan Belanda pada bulan September 1901 (Niel, 1984, p. 51).

Kebijakan baru ini dimulai terutama karena pengaruh beberapa orang Belanda yang menunjukkan adanya “eereschuld” (hutang kehormatan) negeri Belanda terhadap jajahannya, yaitu Indonesia yang telah sekian lama memberikan keuntungan kepada mereka. Berapa cara untuk mengeruk keuntungan adalah antara lain dengan Sistem Tanam Paksa(cultuurstelsel), yang telah membuat rakyat Indonesia menderita (Poeponegoro & Notosusanto, 1984, p. 14).

Politik Etis paling terlihat didalam bidang pendidikan dan pengajaran, karena jumlah guru, sekolah dan murid meningkat dengan pesat. Fasilitas pendidikan untuk orang Indonesia di Jawa bertambah pesat dan dari perluasan dan perkembangan pendidikan inilah ditemukan akar perubahan sosial yang mempengaruhi elite Indonesia. Pada mulanya orang Jawa yang ingin berpendidikan Barat, tidak mendapat dukungan bahkan kadang-kadang mengalami tantangan dari pihak orang tua. Mereka takut akan pengaruhnya bagi kedudukan sosial anak-anak mereka selanjutnya, karena pemerintah kolonial Belanda tetap membatasi perkembangan masalah ini. Perjuangan untuk melancarkan politik kolonial yang progresif itu diteruskan oleh tokoh-tokohnya antara lain: Van Kol, Van Deventer dan Brooschooft. Mereka menginginkan mengubah pandangan dalam politik kolonial yang beranggapan bahwa Indonesia tidak lagi sebagai suatu daerah yang hanya selalu menguntungkan Belanda, tetapi juga menjadi suatu daerah yang perlu dikembangkan dan juga ditingkatkan kesejahteraannya. Pandangan tersebut telah terkandung dalam slogan Politik Etis yaitu “Irigasi, Edukasi dan Emigrasi” (Kartodirdjo, 1972, p. 21).

Dalam bidang pendidikan (edukasi), pemerintah Belanda mulai memperluas kesempatan bagi rakyat Indonesia khususnya dari kalangan atas, untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda. Selama itu sekolah-sekolah berbahasa Belanda hanya menerima siswa yang berasal dari rakyat Indonesia sampai pada tingkat dasar dan menengah, belum sampai tingkat atas. Kondisi tersebut sudah merupakan sebuah kemajuan, sebab sebelum adanya Politik Etis hal itu sangatlah tidak

mungkin terjadi. Sejak saat itu terjadi perluasan dan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia pada akhirnya hal itu berakibat timbulnya beragam elit di Indonesia (Niel, 1984, pp. 74–75).

Salah satu program edukasi yang menghasilkan golongan elit baru di Indonesia adalah sekolah “Dokter Jawa” yang mengadakan reorganisasi pada tahun 1900-1902 dan kemudian berubah menjadi School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen (STOVIA) dengan cara barat. Program edukasi dalam Politik Etis mengakibatkan banyak kaum terpelajar ingin mengadakan perubahan sistem negaranya. Akibat lebih lanjut adalah munculnya pergerakan politik. Kemudian dari STOVIA itu muncul organisasi Indonesia yang pertama yang disusun dalam bentuk modern, Budi Utomo (Nagazumi, 1989).

Politik Etis pada akhirnya didorong oleh kebutuhan perusahaan swasta yang mencari tenaga kerja murah dan berkualitas tinggi. Di balik semua tujuan tersebut, kebijakan politik etis menjadi sarana melahirkan intelektual muda progresif yang mengusung semangat pendidikan dan revitalisasi pribumi dalam perjuangan berabad-abad melawan kolonialisme Belanda. Namun pendidikan modern hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan, elit baru berasal dari kalangan Priyaaai, dan penduduk asli sendiri kurang terpengaruh oleh politik etis. Politik Etis dan Politik Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun Pendirian sekolah bagi anak-anak setempat merupakan langkah awal perjuangan kemerdekaan di kalangan pemuda Indonesia. Siswa yang terdaftar banyak yang merupakan anak bangsawan lokal (elit pribumi), dan anak bangsawan tersebut kemudian tumbuh menjadi intelektual yang memikirkan nasib bangsa. Para pemuda tersebut merupakan lulusan dari sekolah kedokteran, teknik dan lainnya, khususnya kalangan pendidikan yang berperan dalam perjuangan pemuda Indonesia saat itu. Golongan terpelajar baru ini dikenal dengan “elite modern” yang bercirikan:

- 1) Bergaya hidup mewah kebarat-baratan seperti terlihat di kota-kota besar.
- 2) Pemikiran mereka tidak terbatas hanya tentang pemikiran tradisional.
- 3) Keinginan dan tujuan mereka mengarah ke suatu politik baru yang terbebas dari ikatan-ikatan tradisional maupun kolonial.
- 4) Suatu kelompok yang ikut ambil peran didalam suatu mekanisme birokrasi Barat, misalnya sebagai bupati, ambtenaar dan bagi golongan minoritas Tionghoa yaitu dengan mencoba ikut ambil bagian dalam Volksraad

Awalnya perjuangan pemuda Indonesia dimulai dari sekolah menengah (STOVIA, OSVIA, Sekolah Pertanian), namun kemudian siswa dari sekolah menengah juga ikut bergabung. Lulusan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tersebut menjadi pionir gerakan perjuangan dan pembebasan nasional Indonesia menuju kemerdekaan (Agus Susilo & Isbandiyah, 2018)

Lahirnya golongan terpelajar merupakan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia saat itu untuk keluar dari cengkeraman penjajah. Golongan terpelajar berupaya membebaskan bangsa Indonesia dari berbagai diskriminasi yang dilakukan kolonial Belanda. Golongan terpelajar berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat akan rasa nasionalisme melalui jalur pendidikan (Imsawati, 2017).

Beberapa tokoh golongan terpelajar yang lahir saat pergerakan nasional diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dr. Soetomo
- 2) Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara)
- 3) Mohammad Hatta
- 4) Raden Ajeng Kartini

Memasuki paruh awal abad ke-20, Indonesia yang ketika itu masih menjadi wilayah Hindia Belanda, bergerak menuju sebuah zaman yang dinamis dan mulai berkembang. Kaum bumi putera sebagai golongan bangsa terjajah mulai bergerak kembali melawan kolonialisme serta imperialisme. Zaman ini ditandai dengan munculnya kesadaran nasional bumi putera sebagai sebuah bangsa. Dari segi politik, kaum bumi putera menemukan cara-cara baru dalam menghadapi penjajahan Belanda. Cara yang digunakan oleh kaum Bumi putera adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi pergerakan. Perkembangan yang paling penting dan khas pada masa pergerakan nasional di Indonesia yaitu munculnya ide-ide baru tentang organisasi pergerakan dan kesadaran akan identitas sebagai sebuah bangsa (Ricklefs, 2008).

Dalam penulisan sejarah nasional Indonesia yang sampai hari ini masih banyak diakui “kebangkitan nasional” ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo (BO) pada Tahun 1908 oleh kumpulan pelajar STOVIA. Berdirinya Boedi Oetomo menjadi pelopor terbentuk berbagai organisasi di Hindia Belanda, yang mana terbukti diikuti dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan selanjutnya seperti Sarekat Islam, Indische Partij, dan lainnya (Putra, 2013).

4. KESIMPULAN

Pengerakan Nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan yakni pada kurun 1908-1945. Dimana Pendidikan pada masa itu sangat diperlukan terhadap masyarakat pribumi tetapi pendidikan modern hanya dapat dinikmati golongan bangsawan dan kaum elit baru berasal dari kalangan priyayi, sementara bagi rakyat pribumi yang jelata tak mendapat sedikitpun pengaruh kebijakan politik etis yang berdampak signifikan bagi masyarakat pribumi saat itu. Namun seiring berjalannya waktu para siswa dari kaum bangsawan dan priayi yang menjadi pionir berusaha membuat masyarakat pribumi sadar akan diskriminasi sehingga perlahan adanya bentuk pembelajaran pendidikan, dari para pionir tersebutlah yang muncul menjadi golongan elit modern Indonesia pada masa itu dan beberapa organisasi-organisasi kian terbentuk.

5. DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku

Nagazumi, A. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme, Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Graffiti Press.

Niel, R.V. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya

Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi

Putra, M.B.S. (2013). *Vorstenlanden Bergoentjang: Aksi dan Propaganda Haji Misbach dalam Gerakan Kaum Buruh dan Kaum Tahun Jawa Tahun 1916. 1926*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Agus Susilo & Isbandiyah. (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Jurnal HISTORIA*. Vol 6. No 2

Imsawati, D. N. (2017). The Intellectual's Contribution In The National Movement Of In Indonesian 1908-1928. *Jurnal Historica*. Vol 1. No. 2

Marwati Djoened Poesponegoro and Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 61–62. 4

Kartodirdjo, S. (1972). Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia abad XIX-XX. *Jurnal Lembaran Sejarah*, (4)

Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, 3rd ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 50.

Poeponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1984). Sejarah Nasional Indonesia (Vol. V). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009)

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).